

Merawat Keterhubungan Gerak Masyarakat Sipil **Nusa Tenggara Barat**

Catatan Penilaian Situasi Ruang Sipil dan Keterlibatan Publik Provinsi NTB
2025



Civic Engagement Alliance
2025



Potret Demografi, Ekonomi, dan Daya Dukung Ekologis NTB

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan provinsi kepulauan yang berada di antara Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mencakup Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, serta ratusan pulau kecil di sekitarnya. Secara historis, wilayah ini bersama Bali dan NTT pernah menjadi bagian dari Provinsi Sunda Kecil sebelum ditetapkan sebagai provinsi tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)¹ Provinsi NTB tahun 2025, wilayah ini memiliki luas daratan sekitar 20.153 km², terdiri atas 10 kabupaten/kota, dan dihuni oleh 5.731.107 jiwa.² Dari sisi ekonomi, BPS NTB mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 12,49 persen (year-on-year) pada Triwulan IV 2025 dengan pertumbuhan kumulatif tahunan sebesar 3,22 persen. Pertumbuhan tersebut ditopang terutama oleh sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan yang berkembang melalui kebijakan hilirisasi, sementara sektor pariwisata tetap menjadi salah satu penggerak ekonomi utama daerah. Kombinasi sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang strategis, dan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi menjadikan NTB sebagai salah satu wilayah penting dalam pembangunan kawasan Indonesia timur.

Namun, capaian ekonomi tersebut berlangsung bersamaan dengan meningkatnya tekanan terhadap daya dukung ekologis dan ketahanan sosial daerah. Berbagai laporan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia NTB³, dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta publikasi kebencanaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan, alih fungsi lahan, pembangunan infrastruktur dan energi berskala besar, serta lemahnya tata kelola sampah terus memberikan tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup, termasuk berkurangnya tutupan hutan, pencemaran sungai dan wilayah pesisir, serta meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi. Kerentanan tersebut tercermin dari banjir besar yang melanda Kota Mataram pada Juli 2025 dan dilaporkan sebagai salah satu kejadian banjir terparah dalam beberapa dekade terakhir. Pada saat yang sama, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pusat Statistik, dan berbagai laporan organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa NTB masih menghadapi tingginya kasus tindak

¹ Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi NTB 2025 (jumlah penduduk, luas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi).

² Bidang IKP Pemprov NTB, "Pertumbuhan Ekonomi NTB di Tahun Pertama Iqbal-Dinda: Dari Fase Koreksi Menuju Fondasi Transformasi", 18 Februari 2026,

³ Walhi NTB, "Refleksi Akhir Tahun 2025: Lingkungan Hidup NTB masih Bermasalah", <https://walhintb.org/refleksi-akhir-tahun-2025-lingkungan-hidup-ntb-masih-bermasalah/> (diakses 1 Juni 2026)

pidana perdagangan orang (TPPO), tingginya angka dispensasi perkawinan anak, serta tekanan terhadap ekonomi lokal akibat ekspansi investasi dan ritel modern. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pembangunan NTB tidak hanya terletak pada upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kemampuan memastikan bahwa pertumbuhan tersebut berlangsung secara adil, inklusif, dan sejalan dengan keberlanjutan ekologis.

Penilaian Partisipatif Kondisi Ruang Sipil dan Keterlibatan Publik

Penilaian kondisi ruang sipil dan keterlibatan publik yang dilakukan menggunakan instrumen CIVICA yang dikembangkan oleh Civic Engagement Alliance (CEA) Indonesia untuk membaca, memahami, dan merefleksikan ruang sipil dan ruang pelibatan masyarakat sipil berbasis dinamika dan konteks pada masing-masing wilayah di Indonesia secara partisipatif dan mandiri. Instrumen ini dirancang untuk menghadirkan proses belajar, perubahan, dan kolaborasi yang tumbuh di tingkat lokal dan regional.

Melalui dua arena/blok utama yaitu Civic Space dan Civic Engagement, CIVICA membantu masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan jejaring mitra memahami tiga aspek utama, yaitu, bagaimana ruang sipil terbuka dan dimanfaatkan, bagaimana masyarakat sipil memperkuat keterlibatan publik dan bagaimana konektivitas antaraktor dan antarwilayah berkontribusi pada keberlanjutan gerakan.

Refleksi Ruang Sipil dan Keterlibatan Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil di Nusa Tenggara Barat mengadakan konsolidasi di Mataram pada tanggal 12-13 Desember 2025. Peserta konsolidasi berjumlah 35 organisasi masyarakat sipil (OMS) yang berasal dari darat Lombok, Sumbawa, dan Bima. Selain perwakilan OMS, hadir juga dari kalangan akademisi 5 orang dan jurnalis 2 orang. Jumlah peserta kali ini bisa dikatakan banyak. Tentunya akan mewarnai dinamika dalam diskusi di setiap sesi konsolidasi.



Gambar 1. Pemetaan Isu dan Sebaran Wilayah OMS

Serupa dengan wilayah lain, fasilitator mengawali konsolidasi ini dengan menyediakan ruang untuk memberikan pengantar atau penjelasan tentang seluk beluk CEA. Fasilitator juga memberi ruang bicara untuk perwakilan dari Universitas Mataram (UNRAM). Pesan yang disampaikan menjadi pemantik refleksi dalam diskusi-diskusi setelahnya. Masyarakat sipil memiliki tantangan berupa adanya egosektoral ataupun pendekatan kerja yang terpisah berdasarkan isu maupun metode kerja. Padahal persoalan seperti lingkungan, perempuan, anak, demokrasi, dan hak asasi manusia saling berkaitan. Maka, forum ini dapat menjadi momentum untuk refleski situasi cara kerja seperti itu, membangun kesamaan persepsi, dan memperkuat kolaborasi lintas isu dan lintas lembaga.

**“Dimana bumi dipijak,
di situ masyarakat dipajak”**

*Ungkapan satir yang mencuat
saat konsolidasi*

Kampus pun kondisinya juga tidak jauh berbeda. Dunia kampus dibatasi birokrasi dan ruang demokrasi menyempit. Maka dari itu, penguatan gerakan masyarakat sipil ke depan membutuhkan komitmen bersama untuk melampaui sekat-sekat sektoral dan membangun kerja advokasi yang lebih terhubung. Pernyataan dari perwakilan UNRAM diperkuat dengan poin-poin yang muncul saat membaca konteks. Sumatera menjadi pengingat bahwa perubahan tidak dapat dilakukan hanya dengan satu isu, sehingga diperlukan

keterhubungan dan kolaborasi lintas organisasi serta isu. Fasilitator juga menekankan pentingnya saling mengecek peran masing-masing organisasi agar tidak terjebak dalam kerja sektoral dan menghindari “palu gada”.

Catatan Kritis terhadap Ruang Sipil dan Keterlibatan di NTB

Penilaian, eksplorasi, dan refleksi berbasis CIVICA di NTB membuka gambaran tentang kondisi ruang sipil melalui tujuh dimensi yang saling terkait dan menopang keberadaan ruang sipil. Gambaran singkat dari refleksi terhadap tujuh dimensi dari blok Kondisi Ruang Sipil (Civic Space) dan Keterlibatan Publik (Civic Engagement) adalah sebagai berikut

Dimensi Pengorganisasian Basis atau Komunitas

Masyarakat sipil di NTB masih sering berhadapan dengan stigma negatif sebagai “tukang palak” atau sekadar pencari dana. Berangkat dari stigma itu, mereka menerapkan strategi masuk ke komunitas dengan identitas sebagai aktivis atau mitra yang mengedepankan transparansi pengelolaan anggaran. Meskipun pengorganisasian pada isu SDA dan gender minoritas memiliki kerentanan tinggi, upaya membangun ketahanan dilakukan melalui penguatan jaringan inti dan pembentukan posko pengaduan di tingkat basis. Dengan keberagaman strategi ini, terlihat bahwa keberhasilan pengorganisasian basis sangat bergantung pada kemampuan membangun kepercayaan masyarakat melalui aksi nyata dan kemitraan yang setara daripada sekadar menonjolkan identitas lembaga. Selain itu, cerita-cerita pengorganisasian basis dan pembelajarannya banyak muncul, namun belum menjadi pembelajaran kolektif di lembaga dan antara lembaga.

Rekomendasi Prioritas

1. Membangun pengetahuan kolektif terkait pengorganisasian
2. Mengkolaborasikan model-model pendekatan pengorganisasian berbasis pengalaman masing-masing lembaga
3. Transformasi pengetahuan di basis melalui fungsi konektivitas

Dimensi Peningkatan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil

Berbagai organisasi telah memproduksi kekayaan pengetahuan yang luar biasa berupa modul, film dokumenter, buku saku, hingga kurikulum sekolah lapangan, namun semua

sumber daya tersebut saat ini masih terfragmentasi di masing-masing lembaga. Sehingga, belum terhubung dalam sebuah sistem pengelolaan pengetahuan bersama yang mampu mengonsolidasikan, mendistribusikan, dan mengembangkan pengetahuan lintas isu dan wilayah. Pada saat yang sama, praktik perlindungan terhadap aktivis atau safeguarding pun masih bersifat reaktif dan kasuistik tanpa adanya kebijakan bersama lintas organisasi. Meskipun advokasi kebijakan relatif kuat dengan didukung berbagai forum atau aliansi, masih bergerak secara sektoral dan berbasis momentum isu. Oleh karena itu, masyarakat sipil NTB memerlukan sistem pengelolaan pengetahuan kolektif dan komitmen perlindungan bersama agar kapasitas yang sudah kuat tersebut dapat terkonsolidasi menjadi kekuatan gerakan yang lebih besar.

Rekomendasi Prioritas

1. Membangun ruang pengetahuan bersama secara reguler melalui daring atau daring
2. Membangun sistem pendataan pengetahuan di semua OMS, termasuk profil dan kepekaan
3. Membangun kesadaran kolektif masyarakat sipil tentang keamanan dan perlindungan individu dan kelembagaan melalui pendidikan dan sistem kolektif

Dimensi Konektivitas Masyarakat Sipil

Kesenjangan penggunaan teknologi, perbedaan paradigma gerakan, hingga gaya komunikasi antar generasi menjadi tantangan nyata dalam membangun jaringan yang solid di antara para aktivis. Upaya untuk mengatasi hambatan ini mulai dilakukan melalui program magang, keterlibatan aktif kelompok muda dalam kegiatan, hingga penerapan batasan periode kepemimpinan untuk menjamin regenerasi. Meskipun beberapa jaringan telah memiliki basis data anggota dan kepakaran, database kepakaran dan profil organisasi belum semua dikelola secara terbuka dan dapat diakses bersama. Praktik komunikasi dan kolaborasi antarorganisasi juga berjalan sesuai jaringan masing-masing lembaga, sehingga belum terbentuk mekanisme konektivitas yang terintegrasi di tingkat regio.

Rekomendasi Prioritas

1. Membentuk tim kerja untuk memastikan konektivitas berjalan dan sistem database masyarakat sipil terkelola.
2. Membangun model komunikasi dan konektivitas antar OMS di regio berdasarkan pada nilai dan prinsip bersama.

Dimensi Mobilisasi Sumberdaya

Berbagai organisasi masyarakat sipil di NTB telah mengembangkan beragam model mobilisasi sumber daya melalui iuran anggota, koperasi, usaha komunitas, jasa konsultasi, layanan berbayar, pengelolaan hasil pertanian dan kehutanan, dll. Ini menunjukkan tumbuhnya praktik diversifikasi pendanaan di tingkat organisasi dan komunitas meskipun masih terdapat berbagai potensi yang belum dimaksimalkan. Di sisi lain, masyarakat sipil memiliki tantangan utama berupa keterbatasan modal, pengelolaan usaha bergantung pada organisasi, konsistensi produksi, dan akses pasar. Praktik pendanaan kolaboratif antar lembaga juga masih terbatas pada situasi darurat atau momen aksi tertentu saja. Dalam konteks kerja sama dengan donor, posisi tawar OMS berbeda-beda. Sebagian OMS mampu membangun relasi yang lebih setara.

Rekomendasi Prioritas

1. Membangun platform yang berperan sebagai hub-channeling sumber daya, termasuk pengumpulan dan distribusi informasi.
2. Pemetaan dan profil database OMS untuk melihat sumberdaya yang dikelola dan potensi interseksionalitas.
3. Mentoring pengembangan sumber daya, seperti pembuatan proposal dan administrasi.

Dimensi Regulasi Pendukung

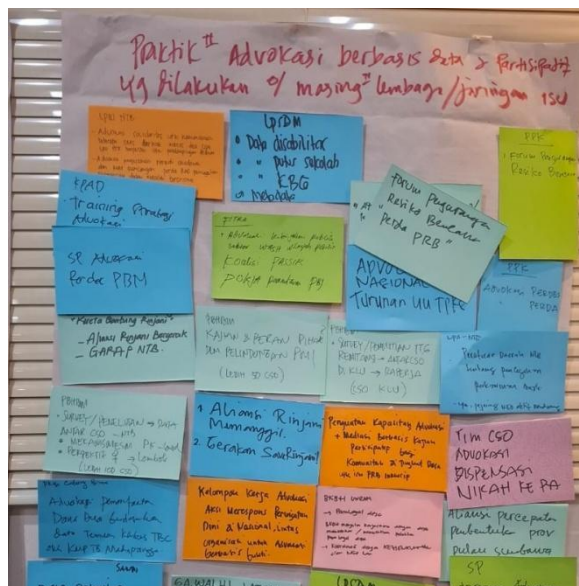
Masyarakat sipil di NTB berhasil mendorong lahirnya berbagai regulasi yang mendukung perlindungan hak, kesetaraan gender, inklusi sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih belum optimal karena lemahnya pengawasan, minimnya dukungan anggaran pemerintah daerah, dan mekanisme monitoring kolektif yang kuat. Di konteks analisa gender mungkin sudah ada digunakan dalam advokasi kebijakan, tetapi belum sepenuhnya melakukan pendekatan interseksionalitas. Meskipun partisipasi masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan

cukup tinggi dan berdampak, terutama di tingkat desa, sejumlah regulasi masih dinilai membatasi ruang gerak. Contohnya sistem perizinan yang birokratis yang menghambat riset dan pasal-pasal karet dalam UU ITE. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi pendukung tidak akan berdampak maksimal tanpa adanya pengawalan ketat dan partisipasi aktif masyarakat sipil agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Rekomendasi Prioritas

1. Membangun watchdog system untuk mengawal implementasi kebijakan.
2. Konsolidasi strategi advokasi berbasis anggaran dan interseksionalitas.
3. Meluncurkan Annual Civil Engagement Outlook (CEA Regio NTB)

Dimensi Konsolidasi dan Narasi Advokasi



Gambar 2. Pemetaan Isu Konsolidasi dan Narasi Advokasi

Konsolidasi gerakan masyarakat sipil di NTB berkembang melalui kerja sama berbasis isu, program, dan wilayah yang melibatkan berbagai komunitas lintas desa dan sektor. Beberapa advokasi oleh masyarakat sipil NTB menggunakan narasi alternatif yang berakar pada sejarah, budaya, pengalaman masyarakat. Contohnya penolakan kereta gantung yang mengangkat narasi ekologi, budaya, sejarah, dan spiritualitas rinjani. Sementara itu, integrasi GEDSI menunjukkan kelompok

disabilitas, perempuan, dan anak lebih diterima dan diperhatikan. Meskipun terdapat yang bersifat programatik, ada dampak yang cukup berpengaruh berupa dukungan infrastruktur dan kemandirian ekonomi disabilitas. Di saat yang sama, adanya tantangan lain di isu GEDSI berupa penerimaan ruang publik terhadap ragam identitas gender/seksualitas belum terbuka.

Rekomendasi Prioritas

1. Membangun watchdog system untuk mengawal implementasi kebijakan.
2. Penguatan narasi advokasi alternatif dan pengarusutamaan GEDSI

Dimensi Demokrasi Ekonomi

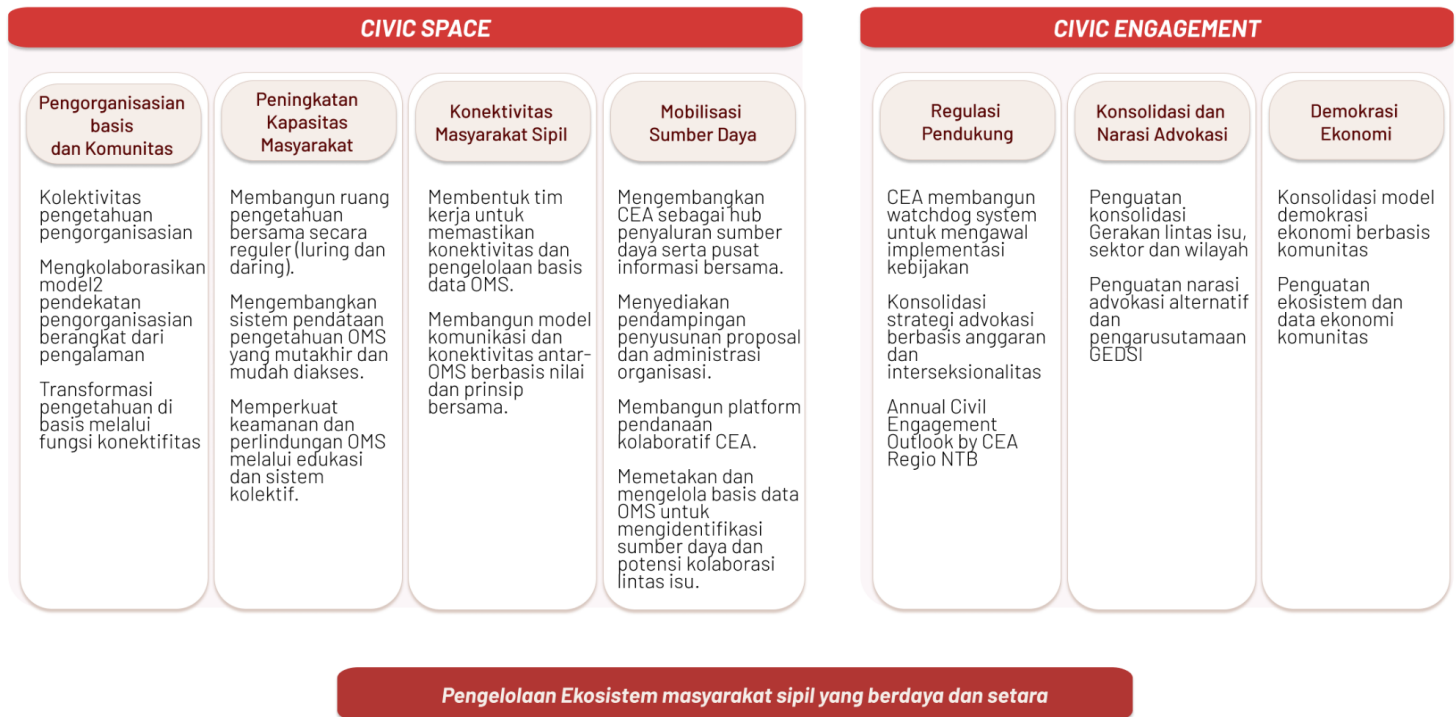
Praktik demokrasi ekonomi mulai mewujud melalui inisiatif komunitas dalam mengelola usaha tenun, produksi pupuk organik, dll. Model kelembagaans seperti Koperasi Bumi Raya berhasil bertahan dan berkembang dengan tata kelola yang mengedepankan kemandirian, nilai moral, dan partisipasi anggota. Koperasi yang sudah berjalan 20 tahun tersebut mampu berkontribusi nyata bagi kesejahteraan anggotanya. Masyarakat sipil di NTB mengupayakan akses terhadap sumber daya dengan cara menghubungkan komunitas tenun dengan jaringan desainer dan pemasaran, serta memfasilitasi tenun ekspo. Berangkat dari situasi tersebut, penguatan ekosistem ekonomi komunitas yang memiliki tata kelola profesional dan mandiri merupakan fondasi penting bagi terwujudnya demokrasi ekonomi di masyarakat, sedangkan ekosistem masih terbatas dan perlu dikuatkan.

Rekomendasi Prioritas

1. Konsolidasi model demokrasi ekonomi berbasis komunitas
2. Penguatan ekosistem dan data ekonomi komunitas

Sintesis Penilaian CIVICA NTB

Sesi refleksi terhadap ruang sipil dan keterlibatan publik menghasilkan rangkuman rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang disajikan dalam diagram berikut:



Gambar 3. Sintesis Penilaian CIVICA Nusa Tenggara Barat

Kesimpulan

Masyarakat sipil NTB sesungguhnya memiliki modal gerakan yang cukup kuat, mulai dari kapasitas pengetahuan yang kaya, beragamnya model mobilisasi sumber daya, hingga keberhasilan mendorong regulasi yang berpihak pada hak-hak warga. Namun kekuatan tersebut belum terkonsolidasi secara optimal karena masih tersekat oleh kerja-kerja sektoral, fragmentasi pengetahuan antar lembaga, dll. Di saat yang sama, tekanan terhadap ruang hidup masyarakat terus meningkat, baik dari sisi daya dukung ekologis yang melemah akibat pengambilalihan ruang hidup maupun dari isu-isu ketimpangan sosial dan ekonomi.

Dalam konteks tersebut, konsolidasi dapat menjadi momentum penting untuk membangun kesadaran kolektif bahwa persoalan di NTB tidak dapat diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan komitmen bersama untuk melampaui sekat-sekat sektoral, memperkuat sistem pengelolaan pengetahuan kolektif, membangun platform bersama termasuk perihal

pendanaan, serta mengintegrasikan perspektif GEDSI dan ekologi dalam setiap advokasi. Kerja gerakan yang lebih terhubung dan multidisiplin ilmu dapat menjadi kekuatan yang mampu menghadapi kompleksitas tantangan supaya lebih efektif dan berkelanjutan.